BAB III

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur

Dalam suatu perkawinan ada tujuan perkawinan yang mana tujuan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya tidak semua perkawinan berlangsung lama, kekal dan abadi seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri. Maka dalam Undang-Undang di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan persidangan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115), ternyata dimuat bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Sanusi Pane, S.H.I., M.H selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 Pukul 09:00 WIB, mengatakan bahwa:¹

“Dalam wawancara dijelaskan bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dominan dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena kecemburuan dan masalah ekonomi sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga”.

¹ Wawancara dengan Sanusi Pane, Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur, 22 Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Adapun alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor moral, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor campuran pihak ketiga, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor tempat tinggal.

1. Dari faktor ekonomi itu sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami untuk bekerja maka seorang isteri akan merasa bahwa haknya belum tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari isteri yang lemah.
2. Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, sebab ketika dari pasangan suami isteri moralnya

lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam rumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisannya yang baik dan kokoh.

3. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Faktor ini adalah faktor yang paling dominan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.
4. Faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan yang suami isteri yang masih ada kedua orang tuanya, dari masing-masing pasangan tidak sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak misalnya seorang isteri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya.
5. Faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang isteri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus yang harus merawat maupun menjaga, yang isteri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak

akur, seharusnya sebagaimana dalam hukum islam seorang isteri harus ikut suaminya ketika sudah terjadi perkawinan.

6. Faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ini terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian cerai gugat itu sendiri adalah pengaduan perceraian dengan suaminya dari pihak isteri kepada hakim (Pengadilan Agama). Apabila isteri menderita tekanan lahir dan bathin atau merasa haknya teraniaya dalam kehidupan rumah tangganya, atau isteri tertekan jiwanya, disengsarakan hidupnya, ditelantarkan nasibnya, maka seorang isteri sudah sewajarnya mengadukan haknya kepada hakim setelah melakukan jalan kekeluargaan tetapi tidak dapat diatasi untuk memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dalam kasus perkara cerai gugat sebenarnya bisa diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka boleh diselesaikan secara hukum. Penyelesaian perkara cerai gugat tentunya tidak mudah begitu saja untuk dikabulkan hal ini harus memenuhi apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Untuk itu penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap 7 (Tujuh) perkara cerai gugat yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur mengenai penyebab terjadinya cerai gugat. Adapun hasil wawancara yang

dilakukan terhadap 7 (Tujuh) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Pertama dengan Nomor Perkara 96/Pdt.G/2020/PA.MS.

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 25 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Tanjung Jabung Timur. Dan Tergugat (Suami), umur 27 tahun, agama islam, bertempat di Tanjung Jabung Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Agustus 2017 dan tercatat dalam akte Nikah Nomor 117/40/VIII/2017.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena sebagai berikut:

- a. Tergugat sering cemburu dan marah ketika Penggugat keluar rumah, walaupun Penggugat sudah izin keluar tetapi Tergugat tetap marah.
- b. Tergugat sering mengekang Penggugat tidak boleh keluar rumah tanpa Tergugat.
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan selalu berkata kasar kepada Penggugat.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Februari tahun 2020, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak sanggup lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Bahwa sebelum hakim memutuskan Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas karena kecemburuan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (Selanjutnya disebut PP 9/1975) Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) Jo. Pasal 2 dan 4 perjanjian sighthat ta'lik thalak, berdasarkan sesuai dengan pasal 119 KHI, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan thalak satu bain sugthro.

2. Kasus kedua dengan Nomor Perkara 111/Pdt.G/2020/PA.MS

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 22 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Tanjung Jabung Timur. Dan Tergugat (Suami), umur 26 tahun, agama islam, bertempat di Tanjung Jabung Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama islam, perkawinan tersebut dicatat di KUA Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Maret 2019 dan dicatat dalam akte Nikah Nomor 195/04/III/2019.

Bahwa pada semasa pacaran Tergugat telah berjanji akan bekerja dan memberikan nafkah terhadap Penggugat, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan menikah Tergugat belum juga bekerja dan selama ini yang menafkahi Penggugat adalah Orang Tua Tergugat. sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja supaya tidak menjadi pengangguran dan hanya mengandalkan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat:

“ gak usah protes, syukur-syukur orang tua ku mau nafkahin kamu, kalau kamu tidak mau silahkan kerja sendiri. Kalau tidak mau kerja cari aja suami lagi “

Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga tersebut, yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2019, pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih enam bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya dengan musyawarah tetapi tidak berhasil. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan untuk bercerai adalah jalan terbaik.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab tersebut di atas karena masalah ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) KHI telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah terpenuhi ketentuan sebagai berikut dalam pasal 19 huruf f PP 9/1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

3. Kasus pertama dengan Nomor Perkara 170/Pdt.G/2020/PA.MS

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 34 tahun, agama Islam, Tempat tinggal Tanjung Jabung Timur. Dan Tergugat (Suami), umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur.

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum dan agama Islam pada tanggal 6 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di kediaman mereka di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 9 tahun.

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga hanya berlangsung selama 9 tahun, pada tahun 2019 Tergugat mengalami bangkrut dalam bisnisnya sehingga fasilitas seperti mobil, motor terjual untuk membayar hutang di bank. Semenjak itu Tergugat sering pergi pagi hari tanpa izin dan pulang tengah malam. Sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena Penggugat menasihati agar Tergugat segera mencari

pekerjaan untuk kebutuhan hidup dari pada pergi tanpa pamit dari pagi hingga malam hari, kemudian Tergugat marah-marah dan bentak Penggugat sambil membanting piring yang ada di meja makan. Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat namun kemudian Tergugat tidak pernah kembali menjemput Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 7 bulan.

Bahwa sebelum hakim memutuskan Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab tersebut di atas karena masalah ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) KHI telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f PP 9/1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

4. Kasus keempat dengan Nomor Perkara 221/Pdt.G/2020/PA.MS.

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Tanjung Jabung Timur. Dan Tergugat (Suami) umur 37 tahun, agama islam, tempat tinggal di Tanjung Jabung Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pada tanggal 5 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat cemburu dan tidak suka Tergugat terlalu akrab dengan rekan kerjanya (wanita) dan sering mengtraktir makanan sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada akhir 2019 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berbohong yang katanya tidak lagi mentraktir rekan kerjanya ternyata masih saja mentraktir. Sehingga perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terjadi, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah berjalan kurang lebih 4 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. pihak

keluarga telah berupaya mengatasi masalah secara musyawarah (kekeluargaan) tetapi tidak berhasil.

Majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

5. Kasus kelima dengan Nomor Perkara 276/Pdt.G/2020/PA.MS.

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat (Suami), umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tanjung Jabunng Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pada tanggal 10 desember 2017 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah karena sibuk bermain motor cross adventur dan tidak mau bekerja padahal kebutuhan semakin bertambah sejak dikaruniai anak yang sekarang sudah berumur kurang lebih 2 tahun, Penggugat tidak sanggup jika hanya Penggugat saja yang bekerja.

Puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2018 yang disebabkan Penggugat kesal dan sakit hati ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk kerja tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat untuk minta uang saja ke orang tua Penggugat yang sudah kaya raya, lalu Tergugat pergi lagi untuk event adventure motor. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi. Selama 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat berkesimpulan bercerai adalah jalan terbaik.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas yang berakibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk

usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6. Kasus Keenam dengan Nomor Perkara 312/Pdt.G/2020/PA.MS

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur. Dan Tergugat (Suami), umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pada tanggal 23 Juni 2006 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri dengan baik. Akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat setiap gajian

tidak pernah lagi memberikan uang belanja dapur dan kebutuhan anak sekolah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah bekerja dan bisa memakai uang Penggugat untuk kebutuhan. Sementara itu uang Tergugat untuk foya-foya. Puncak perselisihan pada tanggal 03 November 2019 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi kemudian Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Bahwa sebelum hakim memutuskan Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas karena masalah ekonomi yang berakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak dapat hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Kasus ketujuh dengan Nomor Perkara 316/Pdt.G/2020/PA.MS.

Perkara ini diajukan oleh Penggugat (Isteri), umur 23 Tahun, bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat (Suami), umur 26 Tahun, bertempat tinggal di Tanjung Jabung Timur.

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Oktober 2018.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena Tergugat sudah 2 bulan tidak memberikan gajinya kepada Penggugat dan Penggugat hanya diberikan uang bulanan sebesar RP. 200.000. Ketika Penggugat minta tambah uang bulanan karena uang RP. 200.000 tidak cukup untuk belanja dapur dan kebutuhan lainnya selama satu bulan, Tergugat tiba-tiba marah dan menendang pintu sambil berkata uang itu susah dicari jadi

jangan boros. Penggugat kesal dan sakit hati kemudian pergi ke tempat kediaman orang tua Penggugat.

Bahwa sebelum Hakim memutuskan Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara/jalan bermusyawarah (kekeluargaan) tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas karena masalah ekonomi yang berakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sukit untuk diatasi serta tidak harapan hidup rukun lagi. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak dapat hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada pertimbangannya, Hakim memutuskan bahwa alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis 7 (tujuh) perkara putusan perkawinan yang berada di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur tersebut maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya cerai gugat di Tanjung Jabung Timur tidak terlaksana dengan baik. Sebab atau alasan yang

ada pada perkara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. alasan juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pada kasus diatas Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan masalah ekonomi dan kecemburuan yang dikarenakan berakibatkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga tidak rukun.

Tabel 3

Penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan agama Tanjung Jabung Timur yang berakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Perkara	Kecemburuan	Ekonomi
Pertama	✓	
Kedua		✓
Ketiga		✓
Keempat	✓	
Kelima		✓

Keenam		✓
Ketujuh		✓

Sumber data: Hasil wawancara bersama responden.

Berdasarkan pada keterangan yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) responden yang dijadikan sampel dalam penelitian skripsi ini pada kenyataannya yang ada di lapangan dalam penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur karena kecemburuan dan masalah ekonomi.

1. Kecemburuan

Salah satu unsur penting untuk dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah adanya saling percaya antara suami isteri. oleh karena itu ketika rasa saling percaya ini mulai hilang diantara pasangan suami isteri, maka yang muncul kemudian adalah saling curiga yang terwujud dalam bentuk rasa cemburu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa “cemburu itu tandanya cinta” tidak selalu benar. Hal ini ketika rasa cemburu itu berlebihan yang kemudian berubah dengan rasa curiga yang menganggap isteri atau suami yang melakukan suatu yang tidak benar, maka yang muncul kemudian adalah pertengkaran yang berkelanjutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, rasa cemburu bukanlah merupakan faktor yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Meskipun demikian persoalannya bukan selesai pada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan

dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran bahkan kekerasan terhadap isteri. hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ oleh karena itu cemburu yang berlebihan dapat dipandang sebagai faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

2. Faktor ekonomi

Alasan ekonomi (uang belanja rumah tangga) juga merupakan salah satu pemicu perceraian, terutama cerai gugat. Suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anak baik karena alasan logis sekalipun misalnya seperti dipecat dari pekerjaannya mungkin bisa diterima dan berusaha untuk mencari pekerjaan lain, akan tetapi kalau sifat malas suami dalam mencari nafkah mungkin ini yang tidak bisa ditolerir lagi. Akan tetapi ketika kedua belah pihak menyadari dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka kata perceraian tidak akan ada.

B. Mengapa Kasus Cerai Gugat Terus Meningkat Di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur

Persoalan tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur dewasa ini sudah merupakan sesuatu yang tren, sehingga sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan kasus cerai gugat yang telah diputuskan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2020 terus meningkat. Untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel yang mana bisa memudahkan dan memahami dari susunan penulis tersebut.

**Tabel 4 Perkara Cerai Gugat yang Diputus pada priode bulan Januari-
Desember Tahun 2020**

BULAN	JUMLAH
Januari	13
Februari	19
Maret	20
April	23
Mei	26
Juni	29
Juli	32
Agustus	34
September	36
Oktober	38
November	40
Desember	45
Jumlah:	355

(Sumber: Data Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur)

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah banyaknya orang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukan menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Bahkan dari data cerai gugat diatas pada tahun 2020 menduduki posisi teratas dan setiap bulannya mengalami peningkatan yang

signifikan. Dari sini timbul pertanyaan apakah mungkin karena prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur yang terlalu mudah? Atau karena cerai gugat ini timbul berlandaskan kebutuhan?

Meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur dikarenakan meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

Dari data yang penulis uraikan dapat dimaknai bahwa bagi sebagian masyarakat cerai gugat merupakan solusi yang paling tepat pada saat ini. Alasan yang paling banyak seperti yang dijelaskan pada laporan tahunan Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah karena faktor kecemburuan dan faktor Ekonomi. Meningkatnya kasus cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pengadilan tidak serta merta mengizinkan pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian, akan tetapi terlebih dahulu diusahakan agar perceraian itu dapat dihindarkan melalui usaha perdamaian, namun apabila usaha itu gagal dilakukan berulah perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pihak Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur sudah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak Pengadilan Agama telah berupaya menyulitkan urusan perceraian tetapi pihak Penggugat sudah yakin dengan keputusannya yaitu bercerai.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 7 perkara tidak ada yang ingin berdamai atau rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat tetap ingin mengajukan perceraian. Maka dari itu Pihak Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur telah mengabulkan permohonannya.